PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 4 (2025)
Agustus - Oktober
e-ISSN : 2622-6383
doi: 10.57178/paradoks.v8i4.1887

Implementasi Blue Economy dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan: Studi Kasus di PPI Mamuju

Fadel Muhammad[1*], Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory[2], Hamzar[3]
Email korespondensi : fadelmuh983@gmai.com
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Indonesia[1*,2,3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Blue Economy pada sektor kelautan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dengan studi kasus di Pangkalan dan Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI) Mamuju. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam dengan nelayan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan laporan terkait kebijakan Blue Economy. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Blue Economy di PPI Mamuju belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Hambatan utama meliputi biaya tinggi alat tangkap ramah lingkungan, berkurangnya hasil tangkapan, keterlibatan masyarakat yang masih terbatas, serta lemahnya program pemberdayaan nelayan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan langsung di laut, dukungan biaya operasional, penguatan program pemberdayaan, pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil, serta perbaikan infrastruktur penyimpanan ikan.

Kata kunci: *Blue Economy; Kesejahteraan Nelayan; PPI Mamuju; Kebijakan Kelautan; Pemberdayaan*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan Indonesia Timur dengan potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Secara geografis, provinsi ini memiliki luas daratan sekitar 16.787,18 km² dan lautan seluas 22.012,75 km² dengan panjang garis pantai mencapai 728,41 kilometer. Terdapat 69 pulau yang tersebar di wilayah ini, dengan potensi perikanan tangkap mencapai 69,45 juta ton per tahun. Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus pintu gerbang pengembangan sektor kelautan. Sebagian besar masyarakat pesisir Mamuju menggantungkan hidup pada perikanan tangkap, budidaya laut, serta perdagangan hasil laut. Namun demikian, potensi yang besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbagai tantangan masih membayangi sektor kelautan, seperti kemiskinan nelayan, fluktuasi hasil tangkapan, abrasi pantai, degradasi ekosistem laut, serta keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai menerapkan konsep *Blue Economy*. Konsep ini merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menekankan keseimbangan ekosistem laut, pelestarian lingkungan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kepala DKP Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa penerapan *Blue Economy*

menjadi landasan penting dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf hidup nelayan.

Penerapan *Blue Economy* sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Fenomena kerusakan pesisir di Sulawesi Barat, seperti abrasi Pantai Mampie dan ancaman terhadap habitat penyu, mencerminkan potensi kerusakan akibat perilaku manusia. Dalam perspektif Islam, *Blue Economy* dapat dipahami bukan sekadar strategi ekonomi modern, melainkan sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip menjaga keseimbangan alam (*mizan*), menghindari kerusakan (*fasad*), dan menjalankan amanah kekhalifahan.

Lebih lanjut, penerapan *Blue Economy* di Sulawesi Barat selaras dengan visi pembangunan daerah "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera" serta program Pancadaya yang dicanangkan pemerintah provinsi. Upaya strategis yang dilakukan antara lain pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan akses permodalan, serta konservasi pesisir. Salah satu contoh nyata adalah program kolaborasi Universitas Sulawesi Barat di Pantai Mampie, Kabupaten Polewali Mandar, yang mengintegrasikan teknologi *geobag* dan penanaman mangrove sebagai mitigasi abrasi. Program ini tidak hanya melindungi ekosistem pesisir, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui teknologi tepat guna dan partisipasi komunitas lokal.

Namun demikian, berbagai hambatan masih ditemui, terutama pada adopsi teknologi ramah lingkungan di PPI maupun sektor budidaya, lemahnya sinergi antar-pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, swasta, TNI AL, dan komunitas nelayan), serta keterbatasan pemahaman nelayan tentang praktik perikanan berkelanjutan. Ancaman abrasi, sedimentasi, dan pencemaran laut turut memperburuk kondisi. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi program *Blue Economy* masih belum terstruktur dengan baik, sehingga dampaknya terhadap pendapatan nelayan belum terukur secara optimal.

Penelitian sebelumnya di Indonesia lebih banyak membahas *Blue Economy* pada tataran nasional, dengan fokus pada peluang ekonomi dan pembangunan jangka panjang (Mukaromah & Rahmawaty, 2023; Fahri et al., 2022; Setyawati et al., 2021). Kajian di tingkat lokal, khususnya Sulawesi Barat, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang berfokus pada implementasi *Blue Economy* di Kabupaten Mamuju dengan menyoroti dampak terhadap kesejahteraan nelayan, faktor pendukung dan penghambat, serta peluang kolaborasi multi-pihak guna meningkatkan efektivitas program.

Landasan Teori

Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Biru

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap krisis ekologis dan sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, seperti kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan ketimpangan akses sumber daya alam (Sarwat, 2022). Sarwat (2022) menekankan keterkaitan *Blue Economy* dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14: *Life Below Water*), yang menempatkan ekonomi biru sebagai instrumen kunci dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Biru (Blue Economy)

Blue Economy dipahami sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan antara kemakmuran manusia dan pelestarian ekosistem laut (Sapriani, Kusumaningtyas, & Elfaki, 2024). Tujuan utamanya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memastikan distribusi manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat pesisir. Sapriani et al. (2024) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pesisir dalam kebijakan, karena hal ini meningkatkan kepatuhan sekaligus rasa kepemilikan terhadap program. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan kebijakan responsif, kewenangan otonom, serta kapasitas pengelolaan potensi maritim secara berkelanjutan. Dalam konteks global, *Blue Economy* juga dipandang sebagai instrumen penting dalam Dekade Ilmu Kelautan PBB (2021–2030), dengan tujuan membangun sistem ekonomi biru yang adil secara sosial dan berkelanjutan. Evans et al. (2023) menegaskan bahwa perikanan skala kecil memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan, gizi, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Proyek *Mikoko Pamoja* di Kenya, misalnya, menunjukkan bagaimana konservasi mangrove dapat dikombinasikan dengan skema kredit karbon untuk memberikan manfaat ekologi sekaligus ekonomi bagi komunitas pesisir. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam implementasi *Blue Economy*. Pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bersinergi melalui inovasi teknologi, tata kelola partisipatif, serta pembiayaan berkelanjutan (Evans et al., 2023).

Kesejahteraan Komunitas Pesisir

Kesejahteraan komunitas pesisir merupakan elemen fundamental dalam strategi *Blue Growth* pada sektor perikanan. Komunitas pesisir sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai basis mata pencaharian. Sulanke dan Rybicki (2021) menekankan dua strategi penting: penerapan *Community Development Quotas* (CDQ) dan dukungan berkelanjutan terhadap perikanan skala kecil. CDQ bertujuan memperluas akses kuota perikanan bagi nelayan kecil, yang seringkali terpinggirkan dalam kebijakan konvensional. Praktik ini terbukti berhasil di Alaska, di mana sistem CDQ meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya (Sulanke & Rybicki, 2021). Selain itu, dukungan berupa pelatihan, inovasi teknologi, serta keterlibatan dalam tata kelola perikanan menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan sosial-ekonomi. Dengan demikian, *Blue Economy* tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologi sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Metode Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Pangkalan dan Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI) Kecamatan Kasiwa, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas nelayan di Mamuju, sekaligus representasi dari dinamika penerapan konsep *Blue Economy* di tingkat lokal. Penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2025, dengan tahapan meliputi observasi awal, penyusunan proposal, pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan hasil penelitian. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan musim penangkapan ikan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif terkait aktivitas nelayan dan kebijakan pemerintah yang berjalan pada saat penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *Blue Economy* pada sektor kelautan, khususnya dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, proses, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai peluang dan tantangan penerapan *Blue Economy* di PPI Mamuju.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung aktivitas nelayan di lokasi pelelangan ikan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi aktivitas keseharian di sekitar PPI. Informan kunci meliputi nelayan, pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam rantai pasok hasil laut. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan peran strategis dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan *Blue Economy* (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik *Blue Economy* dan kesejahteraan nelayan. Data sekunder ini berfungsi memperkuat temuan lapangan, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai aktivitas nelayan, kondisi infrastruktur pelelangan, serta implementasi teknologi ramah lingkungan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan maupun pemangku kepentingan lain. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan, catatan lapangan, serta dokumen administratif. Pendekatan multi-metode ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih valid dan menyeluruh (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi deskriptif, tabel, maupun bagan yang memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang, untuk memastikan konsistensi dengan data lapangan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen untuk menghindari bias dan meningkatkan reliabilitas. Triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Patton, 2015). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana *Blue Economy* diimplementasikan di PPI Mamuju serta dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Responden/Informan

Profil responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai individu yang memiliki latar belakang yang beragam, termasuk nelayan, masyarakat pesisir, serta pihak pemerintah daerah. Setiap responden memiliki peran yang berbeda dalam sektor kelautan dan

perikanan, baik sebagai pelaku langsung seperti nelayan dan pedagang ikan, maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran tentang keadaan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan sektor kelautan di daerah tersebut;

Tabel 1 Profil Informan Penelitian

No.	Nama Lengkap	Usia	Domisili	Pekerjaan/Jabatan	Lama Bekerja
1	Sulfia Hadijah Rajab	40	Mamuju	SDM dan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan	10 tahun
2	Muhlis	52	Jalan Pattimura	Nelayan	15 tahun
3	Sukri	48	Jalan Pattimura	Nelayan	5 tahun
4	Sueharto	45	Jalan yos Sudarso	Nelayan	10 tahun
5	Adit	32	Mamuju	Nelayan	6 tahun
6	Abdullah	22	Mamuju	Nelayan	5 tahun
7	Aldi	25	Mamuju	Nelayan	3 tahun
8	Hendra	29	Mamuju	Nelayan	9 tahun
9	Sadiqul	25	Mamuju	Masyarakat pesisir dan nelayan	Beberapa tahun
10	Syamsul	50	Jalan yos Sudarso	Nelayan dan Warga Pesisir	15 tahun
11	Hajrul	45	Jalan yos Sudarso	Nelayan dan Warga Pesisir	10 tahun

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan penerapan teknik validitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Triangulasi Sumber**
   Informasi yang diperoleh dari nelayan, pemerintah daerah (DKP Sulawesi Barat), dan masyarakat sekitar menunjukkan konsistensi terkait implementasi *Blue Economy*. Nelayan menyatakan bahwa kebijakan ini belum banyak meningkatkan pendapatan mereka, sementara pihak DKP mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan adopsi teknologi ramah lingkungan masih menjadi kendala utama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat sekitar PPI yang menilai bahwa program pemberdayaan belum merata. Konsistensi informasi ini memperlihatkan bahwa triangulasi sumber berhasil mengurangi potensi bias data.
2. **Kredibilitas (Credibility)**
   Kredibilitas data diperoleh melalui proses wawancara mendalam dan member check. Setelah hasil wawancara ditranskrip, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan. Nelayan dan pejabat DKP menyatakan bahwa interpretasi peneliti sudah sesuai dengan maksud mereka. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya serta benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

3. **Dependabilitas (Dependability)**
   Seluruh tahapan penelitian — mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan — telah didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan dan log penelitian. Konsistensi antara prosedur penelitian dan data yang diperoleh memperlihatkan bahwa penelitian ini memenuhi standar dependabilitas.
4. **Konfirmabilitas (Confirmability)**
   Untuk menjaga objektivitas, peneliti menyusun audit trail berupa catatan wawancara, foto dokumentasi, serta dokumen pendukung dari DKP. Hasilnya menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersumber dari interpretasi peneliti, tetapi juga dapat diverifikasi melalui bukti empiris. Dengan demikian, penelitian ini bebas dari bias personal yang berlebihan.

Secara keseluruhan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa data penelitian mengenai implementasi *Blue Economy* di PPI Mamuju memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, baik dari segi kredibilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Dengan demikian, temuan penelitian dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memahami peluang dan tantangan penerapan *Blue Economy* dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Barat. Mengacu pada kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah analisis data untuk mencapai tujuan penelitian Anda tentang implementasi ekonomi biru dalam sektor kelautan di Mamuju:

Tabel 2 Hasil Wawancara Dengan Sulfia Hadijah Rajab, SDM Dan Kelembagaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mamuju:

Topik	Jawaban
Kebijakan Ekonomi Biru	Ekonomi biru di PPI Mamuju adalah upaya mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan menjaga kualitas ekosistem laut. Kebijakan ini mendukung SDG 14 dengan fokus pada pelestarian kehidupan bawah laut.
Program yang Diterapkan	Program yang diterapkan meliputi kampung nelayan merah putih, subsidi alat tangkap, subsidi BBM, akses pasar, dan pendampingan untuk perikanan berkelanjutan.
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	Pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan akses nelayan ke pasar dan mengurangi kerugian akibat praktik perikanan yang tidak berkelanjutan.
Kolaborasi dan Pemangku Kepentingan	Koordinasi dilakukan melalui kampung nelayan merah putih yang dikelola koperasi dan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga lain dalam menyediakan alat tangkap dan subsidi BBM.
Tantangan Kolaborasi	Tantangan utama adalah memastikan komitmen semua pihak (nelayan, pemerintah, swasta) dan memastikan akses yang adil bagi nelayan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.
Akses Nelayan Kecil	Pemerintah memastikan akses yang adil melalui kampung nelayan merah putih yang memprioritaskan nelayan kecil, serta program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam menerapkan praktik berkelanjutan.
Distribusi Manfaat Ekonomi	Pemerintah mengutamakan kebijakan yang mendukung nelayan kecil, dengan memberi prioritas pada akses pasar, subsidi alat tangkap, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Tantangan Implementasi	Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut, serta memastikan partisipasi aktif nelayan kecil dalam ekonomi biru.

Hambatan Kebijakan	Hambatan utama adalah perbedaan antara kebijakan dan praktik tradisional nelayan, serta kesulitan beradaptasi dengan kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan pemerintah.
Indikator Keberhasilan	Indikator yang digunakan mencakup produksi perikanan, konsumsi ikan, jumlah produksi, dan proporsi tangkapan nelayan yang berada di daerah biologis yang aman.
Rencana Pengembangan	Pemerintah berencana untuk melanjutkan program ekonomi biru dengan fokus pada pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan serta memperkuat koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam 3-5 tahun ke depan.

Berdasarkan wawancara dengan Sulfia Hadijah Rajab, SDM dan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, beliau menjelaskan bahwa "Ekonomi biru di PPI Mamuju bertujuan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi yang berbasis pada potensi lokal serta menjaga kualitas ekosistem laut. Dalam 3-5 tahun terakhir, pemerintah Mamuju telah mengimplementasikan beberapa program untuk mendukung ekonomi biru, di antaranya kampung nelayan merah putih yang dikelola oleh koperasi, serta memberikan subsidi alat tangkap, subsidi BBM, akses pasar, dan pendampingan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. (Sufia Hadijah Raja, 25 Agustus 2025)

Tabel 3 Analisis Hasil Wawancara dengan Nelayan

Topik	Jawaban
Mulai Melaut & Alat Tangkap	Melaut sejak 3 - 10 tahun lalu, alat tangkap: jaring, romping, pukat, ikan: tuna, tongkol, cakalang.
Perubahan Hasil Tangkapan	Ikan berkurang, banyak nelayan, sulit dapat ikan besar (tuna, tongkol, cakalang).
Pendapatan	Pendapatan dari melaut, tidak menentu, cukup untuk kebutuhan pokok, tergantung cuaca dan hasil tangkapan.
Ekonomi Biru	Tahu sedikit, kebijakan berpengaruh pada alat tangkap ramah lingkungan, sulit diterapkan, hasil tangkapan berkurang.
Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Menggunakan alat ramah lingkungan, biaya lebih tinggi, hasil tangkapan berkurang.
Dukungan Pemerintah	Ada pelatihan, lebih baik pelatihan di laut langsung untuk praktik nyata.
Program Pemberdayaan Nelayan	Program kurang efektif, belum meningkatkan pendapatan atau akses pasar.
Keterlibatan Perempuan	Perempuan tidak melaut, hanya menjaga kebersihan laut.
Tantangan Akses Laut	Semakin banyak nelayan, hasil tangkapan berkurang, pengelolaan laut belum adil.
Perubahan Iklim	Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, merasa tidak aman saat melaut.

Berdasarkan wawancara tentang tema tema pertanyaan pada tabel diatas dengan Muhlis dan Sukri, dua responden berprofesi sebagai nelayan, menyatakan bahwa, Dukungan pemerintah berupa pelatihan ada, tetapi pelatihan langsung di laut dianggap lebih efektif untuk praktik nyata. Program pemberdayaan nelayan dirasa kurang efektif dan belum meningkatkan pendapatan atau akses pasar. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan melaut tidak ada, mereka hanya terlibat dalam menjaga kebersihan laut. Tantangan terbesar adalah semakin banyaknya nelayan yang melaut, yang menyebabkan hasil tangkapan semakin berkurang, serta pengelolaan sumber daya laut yang dirasa belum adil. Ketersediaan ikan yang terbatas serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca

ekstrem dan gelombang tinggi membuat mereka merasa tidak aman saat melaut. (Muhlis, Sukri, Suhartono, Adit, Abdullah, Aldi, Hendra; PPI Mamuju; Agustus 2025).

Tabel 4 Tabel Analisis Hasil Wawancara dengan Masyarakat Pesisir

Topik	Jawaban
Keterlibatan dan Dampak	Program ekonomi biru belum banyak terasa dampaknya. Masyarakat sekitar belum banyak berubah dan masih melakukan pekerjaan seperti biasa. Pendapatan tetap tergantung pada hasil tangkapan nelayan dan kondisi pasar.
Perubahan Kegiatan Ekonomi	Kegiatan ekonomi masyarakat masih sama seperti dulu. Hanya ketika cuaca bagus dan banyak ikan, pendapatan sedikit lebih banyak.
Kesejahteraan Sosial	Kebijakan ekonomi biru tidak banyak membantu masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam perikanan. Pendapatan lebih banyak bergantung pada cuaca dan harga ikan.
Kesempatan Kerja	Tidak ada banyak kesempatan kerja tambahan. Masyarakat yang tidak melaut lebih bergantung pada pekerjaan sampingan seperti jual ikan di pasar atau membantu nelayan.
Kolaborasi dan Partisipasi	Masyarakat tidak merasa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi biru. Kami hanya mengikuti, kadang ada rapat tapi tidak banyak yang melibatkan kami.
Platform Aspirasi Masyarakat	Belum ada platform atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat atau saran terkait kebijakan kelautan. Kami hanya bisa berbicara dengan sesama nelayan dan masyarakat kecil lainnya.
Keberlanjutan Ekosistem	Masyarakat tahu pentingnya menjaga lingkungan laut, tapi belum banyak yang ikut serta dalam program pelestarian seperti mangrove atau pengelolaan sampah. Kami hanya menjaga kebersihan di sekitar pelelangan dan pantai.
Keterlibatan dalam Konservasi	Kami belum terlibat dalam kegiatan konservasi seperti penghijauan mangrove atau pengelolaan sampah. Yang kami lakukan hanya menjaga kebersihan di sekitar pantai dan pelelangan ikan.
Rekomendasi Kolaborasi	Pemerintah harus lebih melibatkan masyarakat dalam pertemuan dan membuat program yang lebih mudah dipahami. Kami juga butuh tempat penyimpanan ikan yang lebih baik di pelelangan agar ikan tidak cepat busuk.
Peningkatan Pemahaman	Pemerintah perlu membuat program edukasi yang lebih sederhana tentang bagaimana menjaga laut dan mengelola sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan. Kami hanya tahu sedikit, jadi kalau bisa ada informasi yang lebih mudah dipahami.
Keterlibatan dan Dampak	Saya belum melihat banyak perubahan dari program ekonomi biru ini. Kebijakan yang ada belum terlalu terasa manfaatnya bagi kami di masyarakat pesisir. Kami masih menjalani pekerjaan seperti biasa.
Perubahan Kegiatan Ekonomi	Belum ada perubahan yang signifikan. Kami masih bekerja seperti dulu, membeli ikan dari nelayan dan menjualnya ke pasar. Pendapatan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan pasar.
Kesejahteraan Sosial	Kebijakan ekonomi biru tidak terlalu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam perikanan. Kami lebih bergantung pada pekerjaan sampingan seperti jual beli ikan di pasar.
Kesempatan Kerja	Tidak banyak perubahan. Saya tetap menjalankan pekerjaan yang sama, yaitu membeli ikan dari nelayan dan menjualnya. Peluang kerja di sektor kelautan sangat terbatas.

Kolaborasi dan Partisipasi	Kami tidak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat pesisir hanya menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari tanpa ada banyak peran dalam kebijakan yang diterapkan.
Platform Aspirasi Masyarakat	Tidak ada platform yang memungkinkan kami untuk mengungkapkan pendapat atau saran. Kami hanya mengikuti apa yang ada tanpa ada tempat untuk berdiskusi lebih lanjut.
Keberlanjutan Ekosistem	Masyarakat tahu pentingnya menjaga lingkungan laut, tapi kami tidak banyak terlibat dalam kegiatan pelestarian seperti penanaman mangrove atau pengelolaan sampah. Kami lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari.
Keterlibatan dalam Konservasi	Untuk saat ini, kami tidak terlibat dalam kegiatan konservasi atau penghijauan mangrove. Kami hanya menjaga kebersihan sekitar pelelangan ikan dan pantai agar tetap bersih.
Rekomendasi Kolaborasi	Saya rasa perlu ada pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat pesisir, agar kami bisa lebih mengerti dan terlibat langsung dalam program ini. Kami juga perlu didengar dalam keputusan-keputusan yang diambil.
Peningkatan Pemahaman	Masyarakat perlu diberikan edukasi yang sederhana tentang pentingnya menjaga laut. Pemerintah bisa menyediakan informasi yang mudah dimengerti tentang cara menjaga kelestarian sumber daya laut, sehingga semua orang bisa ikut berperan. Jika ada tempat penyimpanan ikan yang lebih baik, itu akan sangat membantu kami.

Ketiga responden juga mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi biru di PPI Mamuju. Mereka merasa lebih banyak mengikuti kebijakan tanpa mengetahui keputusan-keputusan penting yang diambil. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa tidak ada platform atau mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi mereka terkait kebijakan kelautan.

Masyarakat pesisir tahu pentingnya pelestarian ekosistem laut, tetapi mereka merasa kurang terlibat dalam kegiatan konservasi atau pengelolaan pesisir, seperti penghijauan mangrove atau pengelolaan sampah. Mereka hanya melakukan hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan di sekitar pelelangan ikan dan pantai. Masyarakat juga berharap agar pemerintah lebih melibatkan mereka dalam program-program yang bisa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh orang nelayan, satu responden dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, serta tiga orang masyarakat pesisir di sekitar PPI Mamuju, diketahui bahwa implementasi kebijakan *Blue Economy* pada sektor kelautan di Pangkalan dan Pendaratan Pelelangan Ikan Mamuju masih menunjukkan hasil yang terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian SDG 14 mengenai pelestarian kehidupan bawah laut, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir masih belum terasa optimal. Salah satu tantangan utama terletak pada penerapan alat tangkap ramah lingkungan yang membutuhkan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan dengan alat tangkap tradisional. Alat seperti jaring ramah lingkungan dan sistem pengelolaan yang lebih efisien membutuhkan investasi yang mahal, sementara hasil tangkapan cenderung lebih sedikit. Kondisi ini menyulitkan para nelayan untuk beralih, mengingat ketergantungan mereka

terhadap hasil tangkapan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pangan dan pendidikan anak.

Selain itu, kebijakan *Blue Economy* juga belum berhasil mendorong keterlibatan masyarakat secara maksimal. Banyak nelayan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki akses untuk menyuarakan pendapat. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dikelola koperasi dan memberikan subsidi alat tangkap serta bahan bakar minyak, sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun akses pasar bagi nelayan skala kecil. Pengelolaan sumber daya laut pun masih dirasakan tidak adil karena lebih banyak menguntungkan nelayan besar dibandingkan nelayan kecil yang lebih rentan.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti perubahan iklim juga berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas nelayan. Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi membuat nelayan merasa tidak aman saat melaut, sehingga menurunkan frekuensi dan hasil tangkapan mereka. Oleh karena itu, nelayan berharap adanya pelatihan langsung di laut yang lebih praktis, disertai penyediaan informasi cuaca yang akurat untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi *Blue Economy*. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pelatihan langsung di laut yang lebih menekankan praktik nyata agar nelayan lebih siap mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Kedua, perlu adanya subsidi dan dukungan biaya operasional agar nelayan tidak terbebani saat beralih ke alat tangkap yang lebih berkelanjutan. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan melalui mekanisme partisipatif yang jelas dan mudah diakses. Keempat, program pemberdayaan nelayan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, perlu dievaluasi dan diperbaiki agar benar-benar berfokus pada peningkatan akses pasar, efisiensi alat tangkap, dan peningkatan pendapatan nelayan kecil. Kelima, infrastruktur seperti tempat penyimpanan ikan di pelelangan perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan agar dapat dipasarkan lebih lama. Terakhir, kebijakan yang lebih adil perlu ditegakkan sehingga tidak hanya menguntungkan nelayan besar, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat yang nyata bagi nelayan kecil yang merupakan tulang punggung sektor kelautan.

Daftar Pustaka

Ahmed, R. (2023). *Mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui ekonomi biru: Menyeimbangkan kemakmuran dan konservasi laut*. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202407.2584.v1

Arsyad, L. (2019). *Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Audrey Al Fahri, A. (2022). Reformasi implementasi konsep ekonomi biru sebagai upaya proteksi kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Semarang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 4*(3), 525–534.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

David, K. (2020). Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat. *Legal Studies*. https://legalstudies71.blogspot.com/2021/12/kesejahteraan-masyarakat-

pengertian.html (diakses 12 Juni 2025).

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage.

Google Cendekia. (2020). Penelitian terdahulu ekonomi pembangunan. *Cendekia.com*. https://www.cendekia.com/blog/penelitian-terdahulu (diakses 12 Juni 2025).

Hafsah, M. J. (2021). Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). *Medium.com*. https://medium.com/abyanakbar/pengertian-ekonomi-d9c40a66d67f (diakses 12 Juni 2025).

Harsono, G. (2020). *Hidrografi berbasis ekonomi biru*. Sepilihan Esai-Esai. Pandiva Buku.

Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. (2022). Modal sosial dan kemiskinan nelayan. *Jurnal Analisa Sosiologi, 4*(4), 783.

Kuncoro. (2022). Data kualitatif: Pengertian, metode, jenis serta contohnya. *Makinrajin.com*. https://makinrajin.com/blog/data-kualitatif/ (diakses 12 Juni 2025).

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.

M, D. S. (2022). Implementasi ekonomi biru pada sektor kelautan dalam upaya mensejahterakan nelayan perspektif ekonomi syariah (Studi kasus nelayan TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung). [Skripsi].

Mawar, M., Rahman, A., & Hermanto, A. (2023). BUMI MANISE: Wajah pariwisata pesisir Pulau Ambon dalam perspektif ekonomi biru berbasis kearifan lokal. *Mafy Media Literasi Indonesia*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Muh. Alvi Rizki. (2024). Implementasi ekonomi biru pada sektor kelautan dalam upaya mensejahterakan nelayan di Kota Palopo. [Skripsi, IAIN Palopo].

Muh. Syamsul. (2024). Pemanfaatan potensi ekonomi biru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kepulauan Tanakeke. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Murfat, M. Z. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan Usaha Kafe di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, *8*(2), 514-524.

Murfat, M. Z., Mohamad, M., Nasir, M., & Murfat, M. Z. (2025). Effectiveness of Recruitment Policies in Attracting and Retaining Qualified Talent in the Company. *Advances in Human Resource Management Research*, *3*(1), 60-72.

Nazir. (2018). Teknik pengumpulan data dan metode penelitian. *Dqlab.id*. https://www.dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-metode-penelitian/ (diakses 2 Maret 2025).

Naufal, R. N. (2022). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di masa new normal. *Jurnal SENAKOTA, 1*(1), 75–82.

Oki, S. (2020). Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif. *Binus.ac.id*. https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian/kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan (diakses 12 Juni 2025).

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Pathak, S. N., & Vyas, V. S. (2024). Pemanfaatan ekonomi biru: Jalur India menuju pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. *International Journal for Multidisciplinary Research, 6*(6), 34–43. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.32176

Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Tinjauan yuridis tentang ekonomi biru di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 3*(1), 123–156.

Putri, I. A., Zahra, A., Syafi'i, I., Adhuri, D. S., Nadjib, M., & Triyanto, T. (2019). Menyelamatkan mangrove, menyelamatkan manusia: Fish-Collab, pendekatan tata kelola kolaboratif untuk melindungi mangrove di Langkat, Sumatera Utara Indonesia. *Asian Review of Public Affairs and Policy, 4*(3), 87–96. https://arpap.kku.ac.th/index.php/arpap/article/view/174/84

Sarwat, S. (2022). Blue economy, a key to achieve sustainable development: The Bangladesh perspective. *Bangladesh Journal of Law, 20*(2). https://doi.org/10.58710/bjlv20n2y2022a01

Silalahi. (2020). Pahami kata kunci perbedaan data sekunder dan data primer. *Pengertian.com*. (diakses 12 Juni 2025).

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Pengertian penelitian pengembangan, fungsi & cirinya. *Glints.com*. https://glints.com/id/teori/penelitian-pengembangan/#.Yue2BHbP3IV (diakses 12 Juni 2025).

Sujadi. (2019). Metode penelitian dan pengembangan. *Ansoriweb.com*. https://www.ansoriweb.com/2020/03/metode-penelitian.html (diakses 12 Juni 2025).

Sulanke, E., & Rybicki, S. (2021). Community development quotas and small-scale fisheries support as two key concepts for blue growth in fisheries. *Frontiers in Marine Science, 8*, 752764. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.752764

Syahnur, M. H., & Djazuli, A. (2025). Multidisciplinary Integration in Modern Management: A Systematic Review of Seven Strategic Perspectives. *Journal Of Applied Multidisiplinary Studies, 1*(2), 61-71.